

## **Surat kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Keadilan bagi Timor-Leste**

Yang Terhormat Ban Ki-Moon  
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa  
1 United Nations Plaza  
New York, New York 10017-3515

Desember 13 2007

Yang Terhormat Bapak Sekretaris Jenderal

Kami adalah koalisi yang terdiri atas lebih dari 70 organisasi hak asasi manusia dari 14 negara yang peduli atas keadilan bagi penduduk Timor-Leste

Dalam kunjungan pertama Anda ke Timor-Leste sebagai Sekretaris Jenderal, kami mengingatkan bahwa penduduk negara ini telah menanggung tak terhitung penderitaan akibat kejahatan perang dan kejahatan melawan kemanusiaan selama invasi dan 24 tahun pendudukan Indonesia. Kejahatan-kejahatan ini merupakan pelanggaran atas Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, sejumlah resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan perjanjian-perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia.

Kami meminta perhatian Anda terhadap komitmen Dewan Keamanan sebagaimana dinyatakan dalam Resolusi 1264 dan 1272, dan pendahulu Anda, Kofi Annan, untuk menyerahkan mereka yang bertanggungjawab atas kejahatan-kejahatan itu ke hadapan pengadilan. Dalam hal ini, kami memuji keputusan Anda menolak legitimasi Komisi bagi Kebenaran dan Persahabatan (Commission for Truth and Friendship)(CTF) yang bilateral, dan pernyataan ulang Anda bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa "tidak menyetujui atau merestui amnesti bagi genosid, kejahatan melawan kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan serius atas hak asasi manusia serta mereka yang mendukungnya.

Jelas bahwa Pengadilan Ad Hoc Hak Asasi Manusia Indonesia dan CTF telah terbukti tidak sesuai dalam rancangan dan implementasinya untuk mewujudkan keadilan sesuai dengan hukum internasional.

Proses Kejahatan Serius (Serious Crimes process)(yang dilakukan hanya atas kejahatan yang dilakukan di tahun 1999) telah dihentikan oleh Dewan Keamanan di bulan Mei 2005 sekalipun tugas mereka jauh dari lengkap. Sejak itu, Misi Terintegrasi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor-Leste (United Nations Integrated Mission in Timor Leste, UNMIT) mendirikan Tim Penyidikan Kejahatan Serius (Serious Crimes Investigation Team) untuk melakukan penyidikan atas kasus-kasus mulai dari tahun 1999 yang belum sempat diselidiki. Laporan UNMIT yang terbaru „Laporan Perkembangan Hak Asasi manusia di Timor-Leste Agustus 2006 - Agustus 2007“, menandai peran yang dapat dimainkan oleh Komisi bagi Penerimaan Kebenaran dan Rekonsiliasi (Commission for Reception, Truth, and Reconciliation Commission)(CAVR) untuk ‚menyatukan‘ masyarakat Timor-Leste dan untuk ‚mendorong budaya demokratis berdasarkan hukum.‘

Kami mendesak Anda untuk mengadakan debat yang terbuka bagi komunitas internasional mengenai rekomendasi CAVR, di Perserikatan Bangsa Bangsa. Baik CAVR maupun Komisi Ahli PBB (UN Commission of Experts) merekomendasikan pembentukan pengadilan pidana internasional ad hoc bagi Timor-Leste apabila Indonesia dalam waktu singkat, masih saja

gagal mengadili perwira-perwira senior yang bertanggungjawab atas penghancuran di tahun 1999 dalam suatu proses yang dapat dipercaya.

Desakan bagi keadilan substantif bagi kejahatan di masa lalu ini didukung secara luas di Timor-Leste, terutama oleh pihak Gereja dan masyarakat luas. Para pimpinan Timor-Leste tidak dapat diharapkan untuk menanggung beban diplomatis itu sendirian.

Sejalan dengan itu, sebagai antisipasi atas pengadilan pidana internasional ad hoc, kami mendesak Anda untuk secara penuh membentuk kembali proses Kejahatan Serius (Serious Crime process), untuk menyediakan cukup sumber daya dan dukungan. Hal ini seharusnya dilakukan sesuai dengan rekomendasi 7.1.1 dan 7.1.2 dari Laporan CAVR - yaitu, PBB harus menyediakan sumber daya dan tenaga ahli di bidang peradilan, bukan bergantung pada sistem peradilan Timor-Leste. Proses Kejahatan Serius harus menidiki kejahatan perang dan kejahatan melawan kemanusiaan yang dilakukan mulai dari tahun 1975, tidak hanya yang dilakukan di tahun 1999. Indonesia, yang saat ini adalah anggota baik dalam Dewan Keamanan dan Dewan Hak Asasi manusia PBB, harus mengekstradisi mereka yang dinyatakan sebagai tersangka oleh proses Kejahatan Serius.

Di bulan Februari 2000, di halaman gereja di Liquica, salah satu lokasi pembantaian 1999, pendahulu Anda mendesak „keadilan mengungguli kekebalan hukum“. Kami mendesak Anda untuk sepenuhnya mewujudkan janji ini semampu Anda.

Hormat kami,

John M. Miller, National Coordinator  
East Timor & Indonesian *Action* Network, USA  
UN Representative, International Federation for East Timor (IFET)

Yasinta Lujina, Coordinator  
Viriato Seac, Researcher  
La'o Hamutuk Institute for Reconstruction Monitoring and Analysis, Timor-Leste

Mericio Akara, Program Manager  
Luta Hamutuk - Timor Leste

Jose Caetano Guterres. Coordinator of Coordinating Committee  
Dr. Phyllis Ferguson  
East Timor Reflection Network

Timotio de Deus, Director  
Judicial System Monitoring Program (JSMP)

Antero Benedito  
Peace and Community Development Centre

Naldo Rei  
Media Advisor and Author of "Resistance: A Childhood Fighting For East Timor"

Jose Teixeira  
Former Minister for Natural Resources, Minerals and Energy Policy, R.D.T.L. Government  
Member, Timor-Leste Parliament

Rafendi Djamin, Coordinator  
Indonesian Human Rights Working Group

Suraiya IT, Chair  
International Forum for Aceh

Ms. Nel Pattinama, supervisor  
Maluku Masa Depan Foundation  
Moluccan Human Rights Organization  
The Netherlands

Paul van Zyl, Executive Vice President  
International Center for Transitional Justice

Charles Scheiner

International Secretariat  
International Federation for East Timor

Brad Adams, Director for Asia  
Human Rights Watch

Anselmo Lee, Executive Director  
Tadzrul T. Hamzah, South East Asia Programme Officer  
FORUM-ASIA, Thailand

Tupou Vere, Director  
Pacific Concerns Resource Centre

Gus Miclat  
Asia-Pacific Solidarity Coalition (APSOC), Philippines

Juan Federer, Former Coordinator  
East Timor International Support Center

Pedro Pinto Leite, Secretary  
International Platform of Jurists for East Timor, The Netherlands

Bobbi Nassar, UN Representative  
International Federation of Settlements and Neighborhood Centers

Robert B. Fisher, Chairperson  
VIVAT International

James Dunn, UNTAET expert on crimes against humanity in East Timor 2001-2002

Dr Clinton Fernandes  
Australian Coalition for Transitional Justice in East Timor

Dr Helen M. Hill, Chairperson  
Australia-East Timor Association (Victoria)

Brendan Doyle, Treasurer  
Jefferson Lee, Projects Officer  
Australia East Timor Association (NSW)

Rob Wesley-Smith, Convenor  
Australians for a Free East Timor, Darwin

Eko Waluyo  
Indonesia Solidarity, Sydney

Miriam Tonkin, Chairperson  
Australia East Timor Friendship Association, (SA)

Brian T. Manning  
Campaign for an Independent East Timor, Australia

Celine Massa, Campaign Organiser  
SEARCH Foundation, Australia

Maire Leadbeater, Spokesperson  
Indonesia Human Rights Committee, Auckland

Kevin McBride  
National Coordinator  
Pax Christi Aotearoa-New Zealand

Geoffrey C. Gunn, Professor of International Relations  
Nagasaki University, Japan Former consultant sociologist to UNTAET; former consultant to CAVR on "international actors."

Kyo Kageura  
Japan East Timor Coalition

Carmel Budiardjo, Director  
TAPOL, the Indonesia Human Rights Campaign, UK

Christine Allen, Executive Director  
James Whitehead, Director of International Programmes,  
Progressio, London, UK

Gabriel Jonsson, Chairman  
Swedish East Timor Committee

Dr. Monika Schlicher, Executive Director  
Watch Indonesia! Working Group for Democracy, Human Rights,  
Environmental Protection in Indonesia and East Timor, Berlin, Germany

Bruno Kahn Directeur de recherche  
CNRS Paris, France

Carlos.Semedo  
France-Timor Leste

David Webster, former Coordinator  
East Timor Alert Network, Canada

Matt Easton, Director  
Human Rights Defenders Program, Human Rights First

Ed McWilliams, retired senior Foreign Service Officer, former Political Counselor, U.S. Embassy, Jakarta  
West Papua Advocacy Team

Jim Winkler, General Secretary  
General Board of Church and Society. The United Methodist Church, USA

Rev. Dr. Dennis M. Davidson, President  
Unitarian Universalist Peace Fellowship

David Robinson, Executive Director  
Pax Christi USA

Rev. James Kofski, Associate  
Asia/Pacific and Middle East Issues, Maryknoll Global Concerns, Washington

Eileen Gannon, OP  
Dominican Leadership Conference

Marie Lucey OSF, Associate Director  
Leadership Conference of Women Religious

Sister Joan Kirby  
Temple of Understanding  
President, Committee of Religious NGOs at the UN

Judith Mayer, Coordinator  
The Borneo Project, USA  
Rev. John Chamberlin, National Coordinator  
East Timor Religious Outreach

Sharon Silber & Eileen B. Weiss, Co-Founders  
Jews Against Genocide  
Kirsten Moller, Executive Director  
Global Exchange

Elaine Donovan, co-founder  
Concerned Citizens for Peace, Hemlock, NY

David Hartsough, Executive Director  
PEACEWORKERS, San Francisco

Bill Ramsey  
Human Rights Action Service, St. Louis

Vivek Ananthan,  
Center For Creative Activities, Philadelphia

Dr. Brad Simpson, Assistant Professor of History  
University of Maryland, Baltimore County  
Director, Indonesia and East Timor Documentation Project,  
National Security Archive

Carol Jahnkow, Executive Director  
Peace Resource Center of San Diego

Diana Bohn  
Nicaragua Center for Community Action (NICCA), Berkeley, CA

Andy Mager, Staffperson  
Syracuse Peace Council

Roland Watson, Founder  
Dictator Watch

Alan Muller, Executive Director  
Green Delaware

Herbert Rothschild Jr., Coordinator  
Peace Action, Greater Houston Chapter

Jeff Ballinger  
Press for Change

Sr. Sheila Kinsey, OSF, Leader  
Justice, Peace & Integrity of Creation Office Wheaton Franciscans

*Additional signers*

Gustaf Dupe, Chairman  
Committee for the Release of Political Prisoners (KAP T/N)  
Chairman, Association of Prison Ministries, Indonesia Chairman, Law Enforcement Watch (LEW), Jakarta  
General Secretary, Jakarta Christian Communication Forum, (FKKJ)

Mountains Community Resource Network  
Blue Mountains, Australia

Shulamith Koenig, Founding President  
PDHRE, People's Movement for Human Rights Learning; Recipient of the 2003 UN Human Rights Award